

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Danau Rawa Pening merupakan salah satu danau strategis yang telah ditetapkan menjadi 15 prioritas danau nasional dalam Kesepakatan Bali tahun 2009, yang akan ditangani secara bersama dalam rangka menjaga kelestarian dan potensi danau. Danau yang terletak di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Banyubiru ini memiliki luas mencapai 6.488,6 ha, dengan wilayah genangan mencapai 2.667 ha pada musim penghujan dan 1.650 ha pada musim kemarau. Luas yang mencakup banyak wilayah tersebut, menjadikan Danau Rawa Pening menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar danau diantaranya kepada 46.076 petani, 27.739 buruh tani, 2.205 nelayan, 3.746 pengusaha, 2.239 peternak atau perikanan (Raharjo et al., 2019 :2).

Danau Rawa Pening berfungsi sebagai air baku untuk rumah tangga dan industri, air irigasi untuk 39.277 ha sawah, sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jelok Tuntang yang mengalirkan kebutuhan listrik untuk Jawa Tengah Bagian Timur, Solo, Yogyakarta, dan Kudus. Selain itu, danau juga berfungsi dalam bidang perikanan dan pariwisata. Di lihat dari segi sosial dan ekonomi, Danau Rawa Pening memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dimana secara hidrologi danau menampung laju aliran air permukaan, yang kemudian bermanfaat dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat diberbagai sektor

seperti pertanian, perikanan, industri, jasa, dan pariwisata. Berbagai kepentingan utama dalam perairan Danau Rawa Pening, yaitu ketersediaan air untuk pembangkit listrik di Jelok dan Timo, irigasi untuk lahan pertanian di Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan, pengendali banjir untuk daerah Kabupaten Demak dan Grobogan, kegiatan perikanan baik darat maupun perikanan tangkap, hingga budidaya perikanan bagi nelayan dan petani ikan, sumber air baku bagi industri, kegiatan di sektor pertanian dengan lahan pasang surut, kegiatan pariwisata untuk wisata air maupun agro wisata, berbagai kerajinan tangan dengan menggunakan eceng gondok, dan pemanfaatan gambut untuk bahan dasar dalam pupuk organik atau kompos, dan sarana untuk budidaya jamur.

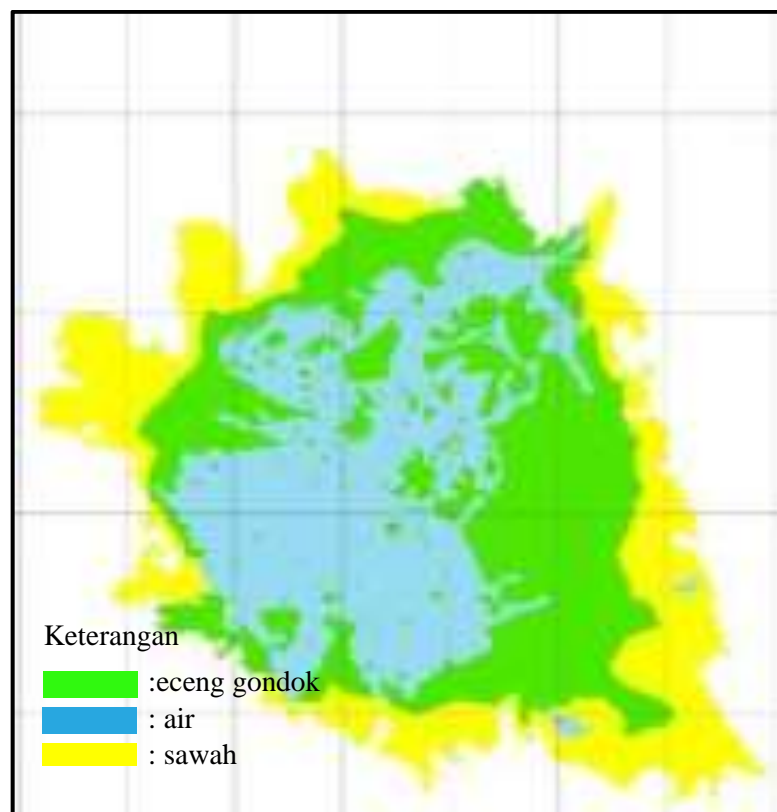
Danau Rawa Pening ternyata memiliki banyak manfaat yang menunjang beragam potensi pada berbagai sektor, namun hal tersebut tak luput dari berbagai permasalahan yang juga dihadapi oleh danau seiring dengan perkembangan waktu. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, disebutkan permasalahan yang dihadapi Danau Rawa Pening yaitu laju sedimentasi yang tinggi dari 9 anak sungai, pertumbuhan eceng gondok tinggi yang berakibat pada pendangkalan danau, turunnya sumber daya ikan, adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas air, konflik kepentingan dalam pemanfaatan Danau Rawa Pening, belum optimalnya konservasi di Danau Rawa Pening, belum optimalnya kelembagaan dan implementasi kebijakan, tanggung jawab dan kewenangan yang saling tumpang tindih, serta masih minimnya pemberdayaan masyarakat. Danau Rawa Pening memiliki 9 sub DAS dengan beberapa sungai yang bermuara di Danau sebagai *inlet*

yaitu sub DAS Rengas, Panjang, Torong, Galeh, Legi, Parat, Sragen, Ringis, dan Kedung Ringin dan sebagai sungai *outlet* yaitu Sungai Tuntang. Dilihat pada administrasi, Sub DAS Rawa Pening terdiri dari 72 kelurahan atau desa di 11 kecamatan yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Sub DAS tersebut dibatasi oleh beberapa gunung diantaranya adalah Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, serta Gunung Merbabu. Sub DAS ini terletak pada ketinggian 368-3.681 mdpl dengan variasi dari datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Sub DAS Rawa Pening memiliki tiga jenis tanah, yaitu alluvial, latosol, dan regosol yang tekstur tanahnya sedikit halus dan kedalaman mencapai 30-90 cm. Kondisi fisik pada DAS Rawa Pening dan sebagai sub DAS mengalami sedimentasi dikarenakan adanya erosi dan gambut hasil pelapukan dari eceng gondok.

Laju sedimentasi Danau Rawa Pening mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan pertumbuhan eceng gondok yang terus naik jumlahnya, sehingga jumlah sedimentasi Danau Rawa Pening tahun 2017 meningkat sebesar 4.215.121,59 ton. Sedimentasi ini juga menyebabkan pendangkalan pada tahun 2017, sehingga rata-rata kedalaman Danau Rawa Pening sebesar 5-8 meter dan pendangkalan pada bagian barat laut danau. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pertumbuhan eceng gondok menjadi salah satu penyebab adanya sedimentasi dan pendangkalan yang berakibat pada penurunan produktivitas sumber daya utama Danau Rawa Pening (Raharjo et al., 2019:2). Pertumbuhan eceng gondok yang masif ini berakibat pada penutupan permukaan danau mencapai 70% dari luas permukaan air Danau Rawa Pening pada musim

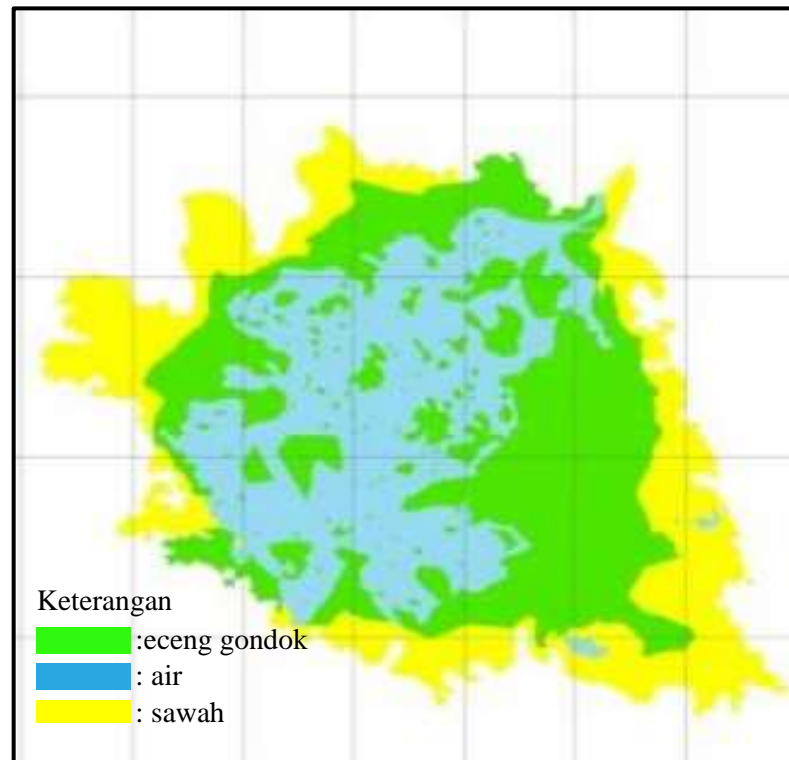
kemarau. Pertumbuhan yang tidak terkontrol ini, disebabkan adanya proses eutrofikasi yaitu proses dimana terjadi peningkatan kadar nitrogen dan fosfor di perairan, namun dapat disebabkan oleh elemen lain seperti silikon, potassium, kalsium, dan mangan, sehingga pertumbuhan menjadi sulit dikendalikan atau disebut dengan istilah *blooming*.

Gambar 1.1 Rawa Pening Tahun 2017



Sumber : Prosiding Nasional Geografi

Gambar 1.2 Simulasi Rawa Pening Tahun 2020



Sumber : Prosiding Nasional Geografi UMS

Dilihat dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan luas lahan eceng gondok atau badan rawa yang tertutupi oleh eceng gondok. Pada tahun 2017 sedimentasi mencapai 4.215.121,59 ton. Laju sedimentasi yang tinggi menyebabkan genangan air danau menjadi tertutup oleh eceng gondok dan berubah menjadi daratan dipinggiran rawa. Apabila tidak ada penanganan yang serius pada eceng gondok, maka dapat diprediksi bahwa luasan eceng gondok di Danau Rawa Pening akan meningkat sebesar 1,5-5% dari luas eceng gondok tahun 2017 seperti pada gambar 1.2. (Indrayati et al., n.d., 2018:551).

Eceng gondok sendiri merupakan tanaman air yang mengalami pembusukan yang menumpuk didasar air kemudian di perparah dengan adanya limbah ikan dan limbah rumah tangga, sehingga komposisi bahan organik di Danau Rawa Pening menjadi tinggi. Komposisi organik yang tinggi ini menjadi salah satu penyebab proses eutrofikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang menyebabkan *blooming* eceng gondok.

Di dalam peneltian yang dilakukan oleh Ariyani Indrayati dan Nur Izzatul Hikmah pada tahun 2018, menyebutkan bahwa apabila dihitung secara sistematis dapat diperkirakan sedimentasi yang terjadi di Danau Rawa Pening pada tahun 2020 mencapai 4.752.961,04 ton yang disebabkan karena sedimentasi akibat erosi lahan sebesar 350.000 ton, dan sedimentasi akibat eceng gondok sebesar 187.839,45 ton. Melihat potensi besar sedimentasi yang terus naik akibat pertumbuhan eceng gondok, maka dibutuhkan adanya pengendalian. Pengendalian yang efektif diperkirakan dapat mengurangi perluasan persebaran eceng gondok hingga 1,6% dari 47,6% serta diprediksikan kedalaman Danau Rawa Pening akan tetap berada pada 5-8 meter. Sementara itu, pengendalian yang dilakukan kurang efektif, diperkirakan berdampak pada penurunan perluasan yang hanya mencapai 0-1% dan tidak mempengaruhi laju sedimentasi dalam jangka waktu pendek, sehingga kedalaman Danau Rawa Pening tetap berkisar pada 5-8 meter, selanjutnya apabila tidak ada pengendalian, maka perluasan penutupan permukaan danau akan meningkat sebesar 1,5-5% serta adanya pendangkalan yang menyebabkan kedalaman danau menjadi sekitar 2-5 meter.

Permasalahan yang dihadapi oleh Danau Rawa Pening juga terkait dengan adanya penurunan kualitas air, dimana sumber daya air dari danau berperan penting dalam sektor pertanian yaitu irigasi lahan, sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan industri lainnya. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Agatha Piranti dan Diana Retna mengenai status mutu air Danau Rawa Pening, disebutkan berbagai permasalahan mengenai kualitas air di Danau Rawa Pening. *Pertama*, air danau yang keruh yang disebabkan adanya tingkat erosi yang tinggi, sehingga membawa partikel-partikel tanah yang menyebabkan air danau berwarna kecoklatan. Air yang keruh ini berpengaruh terhadap aktivitas ikan dan jalur migrasi ikan serta menjadi penyebab tingginya angka kematian pada telur ikan. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan sumber daya ikan. *Kedua*, air di Danau Rawa Pening mengandung bahan organik dan non organik yang cukup tinggi, sehingga air menjadi tercemar. Hal tersebut disebabkan adanya kegiatan budidaya ikan melalui keramba jaring. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, jumlah keramba sebanyak 452 unit dengan total pakan mencapai 1.979,76 ton/tahun. Konsentrasi bahan organik yang tinggi terjadi di muara Sungai Legi, dan Sungai Muncul. *Ketiga*, air danau mengandung logam berat yang dapat menyebabkan efek negatif bagi organisme air dari tingkatan terkecil yaitu individu hingga pada tingkatan komunitas.

Tingginya konsentrasi logam pada air tersebut disebabkan oleh kegiatan pertambangan, pembuangan limbah rumah tangga, pembuangan limbah industri, dan aliran dari pertanian. Logam berat Pb yang terdapat di dalam air danau sudah mencemari hingga pada sedimen bahkan di ikan meskipun masih pada kadar

konsentrasi yang rendah. Ikan yang sudah terkontaminasi dengan logam ini, apabila dikonsumsi dapat berdampak pada kesehatan manusia yang menimbulkan penyakit baik jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Soeprbowati 2011 (Piranti et al., 2018:158), kandungan logam pada air danau ini juga disebabkan karena faktor alami yaitu berasal dari pembentukan danau karena proses vulkanik. Kegiatan pariwisata juga turut menyebabkan kandungan logam tinggi, yaitu ketika penyewaan perahu motor yang memakai bahan bakar solar dan bensin, dimana asap tersebut dapat terakumulasi ke badan perairan. Pupuk pertanian juga mengandung logam berat yang apabila digunakan dalam dosis yang tinggi dan terus menerus dapat meningkatkan kandungan logam pada perairan danau. Air di Danau Rawa Pening dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia, seperti sumber baku dalam industri air minum, sarana pariwisata dan rekreasi alam, kegiatan budidaya perikanan dan tangkap ikan, dan penyedia irigasi bagi kegiatan pertanian di sekitar danau. Kualitas air di Danau Rawa Pening berdasarkan parameter sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.
Status Air Danau Rawa Pening Dibandingkan Dengan Baku Mutu Air
Sesuai Peruntukannya

Parameter	Satuan	Kisaran Konsentrasi	Status Mutu Air Dibandingkan BMA Sesuai Kelas Air			
			I	II	III	IV
TSS	mg.L ⁻¹	140,9-242,1	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Total P	mg.L ⁻¹	0,1-0,2	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
COD	mg.L ⁻¹	22,1-29,2	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
BOD	mg.L ⁻¹	3,6-5,0	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
H ₂ S	mg.L ⁻¹	0,005-0,01	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
Total Coliform	Ind/100 ml	5.500-6.800	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Logam Pb	mg.L ⁻¹	0,02-0,03	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
Logam Cd	mg.L ⁻¹	0,01-0,02	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

Sumber : Piranthi, Agatha, Dian Retba Utarini Suci Rahayu. (2018). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*.

Berdasarkan pada tabel diatas, kondisi air di Danau Rawa Pening tidak layak untuk digunakan sebagai air baku, air minum, dan sarana rekreasi atau pariwisata air, namun masih bisa digunakan sebagai perikanan dan air pertanian. Status mutu air di Danau Rawa Pening telah menunjukkan tercemar berat dengan delapan parameter yang melebihi baku mutu air, sehingga air danau hanya layak dipakai untuk kegiatan perikanan dan pertanian. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat air danau juga sebagai bahan baku dalam kegiatan perindustrian dan kegiatan pariwisata air yang bergantung pada kondisi air danau, namun kualitas air sudah tercemar.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Danau Rawa Pening membutuhkan adanya pengendalian dan penanganan melalui kegiatan konservasi, sebagai upaya pelestarian danau mengingat banyak segi kehidupan yang bergantung pada danau. Konservasi dan pemeliharaan merupakan suatu langkah atau strategi yang bersifat preventif dalam menjaga kelestarian danau, serta bentuk dalam efektivitas biaya. Kegiatan konservasi membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh serta bentuk kegiatan perbaikan yang bersifat kompatibel dan berkelanjutan. Adams dan Hutton (Bires & Raj, 2019:2), menyebutkan bahwa konservasi dapat menjadi sebuah alat untuk pembangunan ekonomi dikarenakan mampu mengintegrasikan konsep pasar kapitalis dan mengubah kebudayaan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Konservasi yang efektif mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, yaitu dengan memperkenalkan potensi dari berbagai sektor seperti pariwisata yang pada perkembangan sekarang ini merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian. Konservasi dibutuhkan dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan maupun sosial ekonomi, mengingat Danau Rawa Pening memiliki nilai ekologis yang sangat besar dan banyak masyarakat sekitar dari empat kecamatan yang menggantungkan kehidupannya dari pemanfaatan danau baik pertanian, industri, pariwisata, pembangkit listrik, dan perikanan. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada Danau Rawa Pening akan menjadi serius apabila tidak ditangani secara efektif dimana sedimentasi dan pertumbuhan eceng gondok yang cukup tinggi.

Pemerintah dalam menghadapi hal tersebut, melakukan berbagai upaya konservasi salah satunya dengan adanya Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Danau Rawa Pening. Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan pengelolaan danau di Indonesia, salah satunya adalah Danau Rawa Pening. Germadan diwujudkan dalam sebuah gerakan rencana pengelolaan yang berisi kelembangaan sampai dengan rencana aksi yang mengikutsertakan *stakeholders* dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama, yaitu pengelolaan dan konservasi danau. Germadan memiliki beberapa tujuan diantaranya, mengaplikasikan teknologi dan sains untuk pengelolaan badan air dan Daerah Tangkapan Air (DTA), mengembangkan pengelolaan dan kebijakan Danau Rawa Pening yang didukung adanya kelembangaan yang baik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dan konservasi Danau Rawa Pening.

Germadan merupakan bentuk perencanaan jangka menengah yang pelaksanaannya ditargetkan dalam jangka waktu lima tahun yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2016, yang dibagi dalam berbagai peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening dengan Pemerintah Pusat sebagai pengarah dan penanggung dalam penyusunan dokumen. Melalui Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, Pemerintah Pusat memberikan anggaran dalam berbagai kegiatan di Danau Rawa Pening dan Daerah Tangkapan Air (DTA). Germadan hingga saat ini terus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk tim pengelolaan Danau Rawa Pening berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/44/2018. Di dalam tim terdapat lima kelompok

kerja (pokja), yaitu penataan ruang dan pengembangan kawasan, bidang pembangunan instruktur, bidang kelestarian lingkungan, bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, serta bidang perizinan dan investasi.

Pemerintah Provinsi dalam kegiatan Germadan berperan dalam pelaksanaan teknis di lapangan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan masyarakat dan swasta berperan sebagai objek dalam kegiatan Germadan tersebut. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, disebutkan permasalahan yang dihadapi meliputi ; (1) belum optimalnya konservasi Danau Rawa Pening; (2) belum optimalnya kelembagaan; dan (3) belum optimalnya implementasi kebijakan. Hal tersebut memicu kurang berhasilnya program, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan kelembagaan tersebut terjadi pada Germadan sebagai salah satu lembaga dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Kelembagaan Germadan tidak memiliki struktur yang kuat, sehingga usaha dalam menegakkan kesepakatan sesuai rencana yang telah ditetapkan menjadi lemah. Penegakan aturan dan rencana sulit dilakukan dikarenakan tidak ada badan yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pemangku kepentingan agar melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sebagai sebuah lembaga, Germadan hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, namun tidak intensif dan dilaksanakan secara periodik.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh S Agung dkk (2019), menyebutkan bahwa Germadan secara umum belum mampu memunculkan dampak yang signifikan terhadap usaha perbaikan dan konservasi di Danau Rawa Pening, dari segi kelembagaan belum mampu mensinergikan kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening dengan instansi-instansi pemerintahan yang ada, selain itu partisipasi masih kurang sempurna dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program. Di dalam pelaksanaannya, Germadan belum terdapat upaya penegakan aturan dan kurangnya insentif baik ekonomi maupun sosial.

Tujuan di dalam pengelolaan kawasan konservasi yaitu bagaimana mengintegrasikan tujuan konservasi, nilai budaya masyarakat, dan tujuan ekonomi (Sudirman & Massiri, 2022:11). Di dalam konservasi Danau Rawa Pening, tujuan konservasi tidak terintegrasi yaitu pada kegiatan pengerukan eceng gondok. Pengerukan eceng gondok bertujuan mengurangi pertumbuhan dan penyebaran yang berakibat pada pendangkalan Danau Rawa Pening. Pengerukan eceng gondok ini dilakukan di berbagai wilayah Danau Rawa Pening mulai dari Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Banyubiru. Pengerukan tersebut bertentangan pada salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kelompok pengrajin eceng gondok. Kelompok pengrajin eceng gondok memanfaatkan eceng gondok dengan dikelola menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Pengerukan eceng gondok tersebut, mengganggu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan eceng gondok, karena masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan eceng gondok.

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai permasalahan, hal tersebut tertulis dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Pemberdayaan menurut Suhendra (Susanto & Jiap, 2016:116), yaitu sebagai program atau kegiatan yang bersifat kontinu dan dinamis, serta secara sinergis dapat mendorong adanya peran aktif dari semua potensi yang ada secara evolutif. Di dalam pemberdayaan, masyarakat diberikan kekuasaan melalui kegiatan pelatihan oleh suatu lembaga, sehingga mampu menguasai berbagai aspek dalam kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan, pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan lain-lain dimana semuanya itu bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat diatur dalam PermenDes PDTT 17 Tahun 2019 mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengembangkan sikap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kesadaran dalam menggunakan sumberdaya yang ada melalui berbagai kebijakan, program, pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat sekitar Danau Rawa Pening memiliki ciri khas berbeda-beda di setiap kecamatan yang dapat diamati pada tabel berikut.

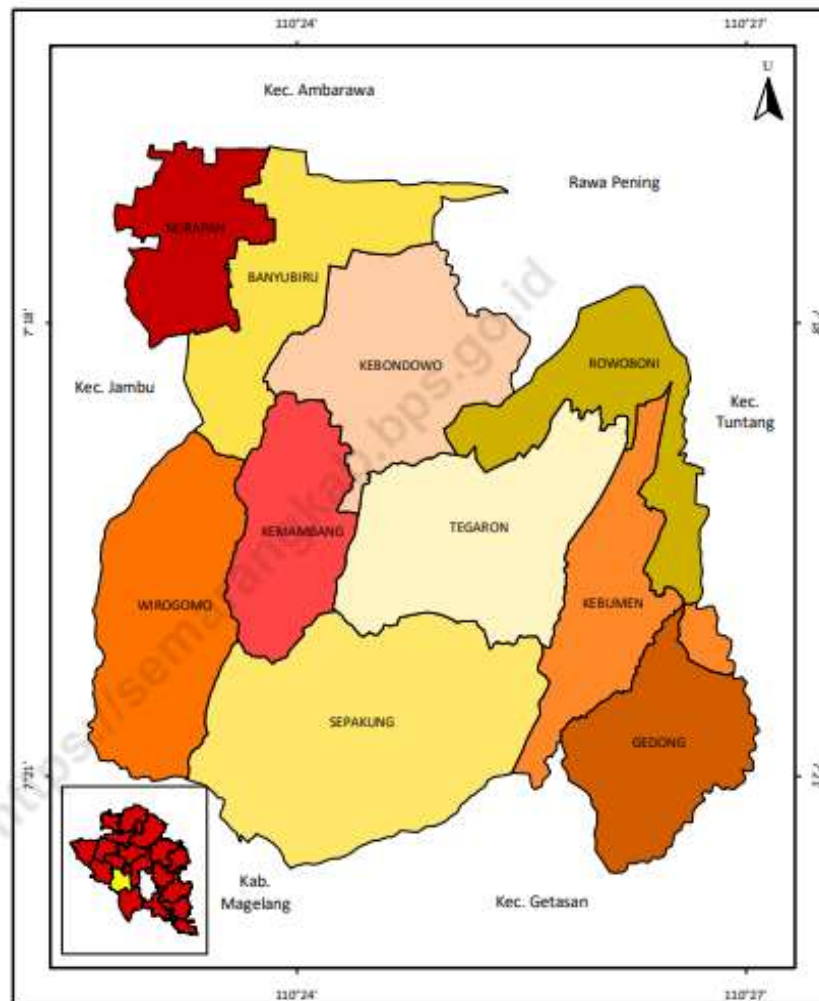
Tabel 1.3
Pemberdayaan Masyarakat Danau Rawa Pening

No.	Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat
1.	Bawen	Pertanian dan peternakan
2.	Tuntang	Pupuk kompos dan kerajinan eceng gondok.
3.	Ambarawa	Kelompok nelayan, budidaya perikanan, perikanan tangkap, dan desa wisata.
4.	Banyubiru	Pertanian, peternakan, budidaya perikanan, perikanan tangkap, kerajinan eceng gondok, perkebunan, dan pariwisata.

Sumber : Data Observasi April Mei 2021

Berdasarkan pada berbagai pemberdayaan masyarakat di Danau Rawa Pening yang meliputi empat kecamatan, Kecamatan Banyubiru merupakan salah satu yang beragam dengan adanya sentra kerajinan eceng gondok, berbagai UMKM yang bergerak dalam pengolahan produk perikanan, kelompok tani serta pengembangan dalam sektor pariwisata. Desa Kebondowo menjadi salah satu desa di Kecamatan Banyubiru yang melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan eceng gondok, perkebunan, dan pariwisata. Hal tersebut dikarenakan Desa Kebondowo berada pada lokasi strategis dengan Danau Rawa Pening, sehingga memiliki banyak potensi untuk diberdayakan. Lokasi Desa Kebondowo dapat diamati pada peta berikut.

Gambar 1.3 Peta Desa Kebondowo



Sumber : Banyubiru dalam Angka 2020

Desa Kebondowo memiliki luas wilayah sebesar 694.600 ha yang terbagi menjadi tanah basah sebesar 272.34 ha, tanah kering sebesar 98.70 ha, tanah rawa sebesar 252.70 ha, bangunan pekarangan sebesar 196.25 ha, tegal dan kebun sebesar 116.25 ha, tanah sawah irigasi sebesar 137. ha, tanah sawah irigasi teknis setengah sebesar 175,2 ha. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Kebondowo adalah tanah rawa atau wilayah Danau Rawa Pening. Wilayah yang strategis menjadikan Desa Kebondowo memiliki potensi yang sangat beragam

diantaranya eceng gondok, perikanan, pertanian sawah padi, perkebunan dan pertanian sayur buah, peternakan, dan pariwisata. Potensi-potensi tersebut menjadi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kelestarian potensi yang dimiliki.

Cukup beragamnya program pemberdayaan masyarakat di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, tidak luput dari masih adanya permasalahan yang ditemui selama keberlangsungan program tersebut. Salah satunya pada program pemberdayaan pengolahan eceng gondok. Permasalahan yang ditemui disebabkan karena kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pemberdayaan, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang kurang percaya diri dalam menggali potensi yang dimiliki, bergantung kepada arahan dan program dari pemerintah desa maupun lembaga lainnya, dan masih memiliki superego (Munfaati et al., n.d., 2019:15). Pemberdayaan masyarakat pada sektor kerajinan eceng gondok belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana Dinas dan aparat desa masih kurang dalam memberikan petunjuk secara efektif dan efisien. Hal tersebut berdampak pada perkembangan kemajuan usaha kerajinan.

Mardikanto dan Soebiato, mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah proses yang mengoptimalkan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu penduduk yang mengalami kemiskinan (Ir. Hendra Hamid, 2018:10). Pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan belum mampu memperbaiki kondisi sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru. Pendidikan rata-rata masih mengikuti sekolah wajib 12 tahun dan belum ada kesadaran untuk melangkah pada pendidikan yang

lebih tinggi. Masyarakat Desa Kebondowo yang tidak bersekolah sebanyak 1.747 dan belum tamat SD sebanyak 306 jiwa. Sebagian besar masyarakat masih bekerja sebagai buruh dengan pendapatan yang belum tetap, dan indeks kemiskinan Desa Kebondowo pada tahun 2018 sebesar 13,92%.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kebondowo masih berlawanan dengan kegiatan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada kegiatan pengerukan eceng gondok di beberapa wilayah Danau Rawa Pening, dapat mengganggu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan eceng gondok menjadi kerajinan. Pengerukan eceng gondok dapat mengurangi penyebaran eceng gondok yang berakibat pada masyarakat sulit mengambil eceng gondok. Pada kegiatan pariwisata masyarakat dengan menggunakan perahu mesin motor juga mengganggu pelaksanaan konservasi. Mesin motor yang menggunakan bahan bakar solar dapat berakibat buruk bagi kualitas air di Danau Rawa Pening, karena menyebabkan tingginya kandungan logam pada air.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dilihat dari sudut pandang manajemen didalam proses pemberdayaan masyarakat. Adapun judul yang diambil yaitu “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Usaha Konservasi Danau Rawa Pening Desa Kebondowo”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan lingkungan berupa laju sedimentasi yang tinggi dan pertumbuhan enceng gondok yang berdampak pada bertambah luasnya kawasan yang tertutup dan kedalaman air danau yang semakin rendah.
2. Turunnya sumberdaya ikan akibat pencemaran lingkungan yang juga berdampak pada kualitas air danau yang sudah tidak layak dimanfaatkan pada beberapa sektor.
3. Permasalahan kelembagaan pada Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) yang berdampak pada tidak efektifnya kinerja Germadan dalam melakukan konservasi serta beberapa program tidak dapat menghasilkan output yang diharapkan.
4. Pemberdayaan masyarakat belum optimal ditandai tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang belum tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat dan kondisi danau yang masih buruk.
5. Di dalam manajemen untuk pemberdayaan masyarakat masih terdapat ketidakjelasan terkait lingkungan yang ditandai dengan minimnya program pemberdayaan untuk melestarikan danau dan kurangnya laporan yang jelas mengenai pelaksanaannya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti memberikan batasan masalah yang akan dibahas dan dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah dibawah ini, yaitu :

1. Bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo?.
2. Apa faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi di Danau Rawa Pening khususnya pada Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi di Danau Rawa Pening khususnya pada masyarakat Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Pada segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya pada masyarakat Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya pada masyarakat Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
3. Menjadi referensi pada penelitian-penelitian mendatang dengan tema terkait dengan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Pembaca
 - a. Memberikan pandangan dan pemahaman mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
 - b. Memberikan pandangan dan pemahaman mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
2. Bagi Peneliti
 - a. Memberikan pandangan dan pemahaman peneliti mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

- b. Memberikan pandangan dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
 - c. Memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai tata cara penelitian dan penulisan laporan sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya lebih baik.
3. Bagi Pemerintah
- a. Memberikan evaluasi dan analisis mengenai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dalam usaha konservasi Danau Rawa Pening pada Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
 - b. Memberikan pandangan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening khususnya di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Raharjo, Falah, dan Cahyono : Germadan Rawa Pening : Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 2019. 3(1), 1-12.	Mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan Germadan dalam perspektif teori <i>collective action</i> . Metode Kualitatif.	Sebagai sebuah kerjasama, Germadan belum berhasil dikarenakan partisipasi dalam perencanaan masih belum maksimal, kurangnya upaya penegakan, dan kurangnya insentif ekonomi maupun sosial di dalam pelaksanaannya.
2.	Purwowibowo, P., Santoso, B., Nufus, B. H., & Hendrijanto, K. : <i>Coastal Community Empowerment Strategy And The Role Of Local Informal Leaders</i> . In <i>The International Seminar Series on Regional Dynamics</i> . 2019. Vol. 1, No. 1.	Mengetahui peran pemimpin lokal dalam pemberdayaan masyarakat untuk konservasi hutan bakau. Metode kualitatif.	Pemimpin informal lokal mempunyai posisi yang strategis, unik, terhormat, mampu menjadi panutan dan penggerak kegiatan masyarakat sehingga masyarakat pesisir dapat bersama-sama melakukan kegiatan konservasi hutan mangrove.
3.	Faedulloh, Dodi; Irawan, Bambang; Prasetyanti, Retnayu. Program unggulan kampung iklim (proklim) berbasis pemberdayaan masyarakat. <i>Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)</i> , 2019, 4.1: 28-44.	Melakukan analisis komparatif implementasi Program Unggulan Iklim Kampung. Metode Kualitatif.	Aspek pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan pada desa, namun partisipasi masih belum dikelola dengan baik.

No.	Nama Penulis, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode	Hasil Penelitian
4.	Bires, Zemenu; Raj, Sahil. <i>Determinants of environmental conservation in Lake Tana Biosphere Reserve, Ethiopia. Heliyon</i> , 2019, 5.7: e01997.	Menyelidiki faktor-faktor yang menentukan konservasi Danau Tana. Metode kualitatif dan kuantitatif.	Sedikit perhatian pemerintah dan kurangnya kebijakan serta rencana pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi merupakan faktor utama yang menghambat konservasi.
5.	Ferreira, Teresa Cunha. (2017). "Bridging Planned Conservation and Community Empowerment : Portuguese Case Studies".	Menyajikan untuk menunjukkan bahwa konservasi terencana semakin berhasil bila dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengguna lokal. Metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi secara langsung	Penelitian yang dilakukan menunjukkan masih sangat sedikit contoh penerapan preventif-terencana strategi konservasi. Ada banyak kemungkinan alasan mengapa pemeliharaan tidak dilakukan yaitu karena masalah budaya terkait, kurangnya tenaga kerja terampil, kesulitan akses ke pendanaan untuk jenis strategi ini dan, akhirnya tidak adanya kerangka hukum.
6.	Wali, Alaka, et al. <i>A new approach to conservation: using community empowerment for sustainable well-being. Ecology and Society</i> , 2017, 22.4.	Mengintegrasikan konservasi dan kesejahteraan manusia dengan pendekatan berbasis aset untuk konservasi. Metode kualitatif.	Memvalidasi aset sosial dan ekologi melalui pendekatan berbasis aset memberikan strategi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi. Pendekatan ini diperlukan untuk dapat menentukan bagaimana memberdayakan masyarakat lokal secara efektif dikaitkan dengan konservasi.
7.	Rahmat, Abdul; Izudin, Ahmad. <i>Impact evaluation of community empowerment programs with the farmer managed extension model</i> . 2018.	Mendeskripsikan hasil evaluasi program bantuan teknologi pertanian untuk pemberdayaan masyarakat. Metode	Hasil pemetaan menunjukkan bahwa program bantuan teknologi pertanian dibutuhkan dalam empat bidang yaitu pesisir, kehutanan, persawahan, dan pegunungan, sedangkan evaluasi program yang

		kualitatif dan kuantitatif.	diujicobakan didasarkan pada hasil hipotesis pengujian dengan hasil hipotesis diterima.
--	--	-----------------------------	---

No.	Nama Penulis, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode	Hasil Penelitian
8.	Hafizi, Muh Zaynal; Golar, Golar; Sudhartono, Arief. Pola Pemberdayaan Masyarakat Di Hulu Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Penerapan Program SCBFWM di Desa Winatu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah). <i>Jurnal Warta Rimba</i> , 2016, 4.1.	Mengetahui pola, metode, dan kendala dalam pemberdayaan masyarakat serta mengidentifikasi kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Masyarakat. Metode kualitatif.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Winatu sudah tepat sasaran dan dapat berkontribusi atas ketekunan proyek SCBFWM. Pemberdayaan tersebut meliputi pembentukan kelompok tani, pelatihan kemandirian kelompok, sosialisasi berkelanjutan, rehabilitasi lahan, pengembangan usaha pertanian dan peternakan, dan perbaikan struktur lembaga.
9.	Susanti, Dewi. Strategi Konservasi Berbasis Masyarakat Pada Kompleks Situs Gua Prasejarah Bellae Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. 2016.	Menemukan strategi pencegahan kerusakan Gua-gua prasejarah dengan mengikutsertakan warga sekitar masyarakat sebagai bagian dari stakeholder. Metode kualitatif.	Kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pemahaman masyarakat yang minim untuk berpartisipasi dalam usaha pelestarian yang dilaksanakan di Kompleks Gua Prasejarah Bellae.
10	Susanto, Andrian. Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat (Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). <i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik</i> , 2016, 2.2: 112-119.	Mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan TNGM terkait pemberdayaan masyarakat di desa sekitar TNGM. Metode kualitatif.	Di dalam perencanaan pengelolaan /tngm sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif, meskipun hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susanti dengan judul penelitian Strategi Konservasi Berbasis Masyarakat Pada Kompleks Situs Gua Prasejarah Bellae Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (Susanti, 2016). Penelitian ini membahas mengenai strategi dalam mencegah kerusakan di gua-gua prasejarah pencegahan Kompleks Gua Prasejarah Bellae dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai salah satu stakeholder, sehingga dapat membuat tindakan preventif terhadap kerusakan yang telah terjadi. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD). Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor alam dan faktor manusia menjadi penyebab dari kerusakan yang ada di kompleks Gua Prasejarah Bellae. Faktor manusia tersebut meliputi kurang kepedulian masyarakat terhadap peninggalan arkeologis dan kelestarian lingkungan. Masyarakat masih belum paham, tetapi ada kemauan untuk ikut serta usaha pelestarian yang dilaksanakan di Kompleks Gua Prasejarah Bellae.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Adrian Susanto membahas mengenai perencanaan pengelolaan kawasan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan judul penelitian Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Susanto & Jiap, 2016:114-121). Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan TNGM yang membutuhkan peran partisipasi dari pihak masyarakat dalam mewujudkan perencanaan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, dimana hal tersebut menjadi standar dalam

penilaian keberhasilan kinerja dari BTNGM dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat disekitar TNGM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai yaitu model interaktif Miles. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perencanaan pengelolaan TNGM berbasis pemberdayaan masyarakat sudah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak prosedural lagi. Di dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif, meskipun hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial pada organisasi. Di dalam penelitian disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang telah terlaksana dan direncanakan dengan baik yaitu, penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberian bantuan peningkatan usaha ekonomi, kerjasama dengan pihak luar, dan model desa konservasi. Pada penelitian ini stakeholders terdiri dari 4 unsur utama yaitu BTNGM sebagai perencana dan penyedia anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang merupakan sasaran, pemerintah daerah sebagai pembina, dan dinas atau instansi terkait yang merupakan pemberi materi dan pendamping teknis perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan dari konservasi yang dilakukan oleh S. Agung Raharjo, Faiqotul Falah, dan Andy Cahyono dengan judul penelitian *Germadan Rawa Pening : Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources* yang membahas mengenai Germadan yang merupakan kebijakan dalam pengelolaan danau yang dilaksanakan melalui pembentukan

kelembagaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (Raharjo et al., 2019:1-12). Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksanaan Germadan (Gerakan Penyelamatan Danau) dengan perspektif teori collective action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa, Germadan secara umum tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan ekosistem danau, pada sisi kelembagaan juga belum dapat menyatukan kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening oleh instansi-instansi yang ada. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu gagal menciptakan collective action. Hal tersebut dikarenakan partisipasi dalam perencanaan masih kurang sempurna, kurang adanya upaya penegakan aturan, dan kurangnya insentif baik ekonomi maupun sosial. Kendala-kendala mengakibatkan kecenderungan free rider dan rendahnya partisipasi beberapa pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Germadan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bires Raj dengan judul penelitian *Determinants of Environmental Conservation in Lake Tana Biosphere* yang membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan konservasi salah satu ekosistem utama di Ethiopia yaitu Cagar Biosfer Danau Tana (Bires & Raj, 2019). Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yang diikuti dengan pendekatan kualitatif, pengambilan data melalui kuesioner, observasi, *focus group discussion*, wawancara tidak terstruktur, dan konsultasi data sekunder. Di dalam penelitian disebutkan bahwa degradasi lingkungan, sedimentasi, dan eceng gondok serta pembuangan limbah menjadi ancaman utama bagi ekosistem biosfer Danau Tana.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia dimana faktor manusia menjadi hal yang paling dominan. Di dalam menyelidiki praktik dan faktor yang menjadi penentu konservasi, sangat penting untuk tidak hanya melestarikan ekosistem alam dengan spesies keanekaragaman hayatinya, tetapi juga untuk menyelamatkan dan menopang jutaan orang yang kehidupannya bergantung pada danau seperti penangkapan ikan, kayu bakar, budidaya pada bidang pertanian, kegiatan perdagangan, perjalanan, dan pariwisata, sehingga pelestarian lingkungan Danau Tana diukur dengan kepedulian lingkungan dan partisipasi. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, disebutkan 10 variabel yang digunakan dalam analisis, terdapat enam variabel yang signifikan yaitu status perkawinan, ukuran rumah tangga, sumber pendapatan, pendapatan rumah tangga, keanggotaan klub dan lokasi penduduk.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Teresa Cunha Ferreira dengan judul *Bridging Planned Conservation and Community Empowerment : Portuguese Case Studies* yang membahas mengenai konservasi terencana dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengguna lokal (Ferreira, 2018). Pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, di Portugal jumlah penerapan strategi konservasi masih sedikit, ada banyak alasan mengapa pemeliharaan dan konservasi tidak dilakukan, yaitu adanya masalah budaya yang berkaitan dengan hilangnya kebiasaan pemeliharaan dan adanya keuntungan ekonomi dari pemeliharaan yang berlawanan dengan kepentingan langsung dari para profesional yang terlibat. Terdapat beberapa penyebab lain diantaranya kurangnya tenaga kerja terampil,

kesulitan dalam menerapkan atau mendapatkan akses ke pendanaan untuk strategi semacam ini dan pada akhirnya tidak adanya kerangka hukum dan kelembagaan yang sesuai dengan praktik konservasi dan pemeliharaan yang direncanakan secara preventif. Penelitian ini menekankan peran masyarakat dalam melaksanakan tindakan konservasi preventif dan tanggung jawab yang ditimbulkannya yang tidak hanya berdampak dari sudut pandang ekonomi, namun juga perspektif pemberdayaan.

Dodi Faedlulloh, Bambang Irawan, dan Retnayu Prasetyanti dalam penelitiannya yang berjudul Program Unggulan Kampung Iklim (PROKLIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, membahas terkait pelaksanaan program kampung iklim berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Jakarta Timur dan Desa Kebon Kosong Jakarta Pusat yang merupakan sebuah program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak terkait untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (Faedlulloh et al., 2019:28-45). Pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan teknik memilih informan menggunakan *purposive* sampling. Pengukuran validitas menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara. Untuk mendukung hasil penelitian, digunakan pendekatan studi kepustakaan berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kebon Kosong maupun di Desa Jati telah menekankan aspek pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Proklam terutama pada kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, namun pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat di Desa Jati masih tidak dikelola dengan baik, sedangkan di Desa Kebon Kosong pelaksanaan Proklam lebih runtut dan berkelanjutan. Secara substansi pelaksanaan Proklam telah diterapkan dengan baik disetiap lokus. Proklam dengan pengelolaan yang gigih dipandang mampu mengelola iklim mikro yang berdampak lebih luas pada penurunan suhu di ibu kota.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muh Zaynal Hafizi, Golar, dan Arief Sudhartono yang membahas mengenai pola pemberdayaan masyarakat dengan judul Pola Pemberdayaan Masyarakat di Hulu Sub Daerah Aliran Sungai MIU Kasus Penerapan Program SCBFWM di Desa Winatu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Hafizi et al., 2016:89-96). Di dalam penelitian ini dibahas mengenai pola pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, metode pendampingan program pemberdayaan masyarakat terapan, dan kendala-kendala dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat di hulu sub DAS sungai Miu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden adalah fasilitator lapangan dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pola pemberdayaan di Desa Winatu sudah sesuai rencana dan mampu berkontribusi terhadap kelangsungan program SCBFWM dengan pola pemberdayaan meliputi pembentukan kelompok tani atau CBO Ulu Miu Pewatua, pelatihan kemandirian pada kelompok, sosialisasi yang berkesinambungan, rehabilitasi lahan, pengembangan usaha tani, peternakan dan perbaikan struktur kelembagaan pada kelompok tani. Hamabatan yang ditemui

selama proses pemberdayaan yaitu terkait dengan permasalahan non teknis seperti akses ke lokasi yang sulit dijangkau, tingkat kesibukan masyarakat, dan kontur Desa Winatu yang berbukit.

Alaka Wali, Diana Alvira, Paula Tallman, dkk dalam penelitiannya yang berjudul *A New Approach to Conservation using Community Empowerment for Sustainable Well being* membahas mengenai partisipasi masyarakat lokal yang merupakan hal penting dalam keberhasilan konservasi, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam memadukan konservasi dan kesejahteraan manusia (Wali et al., 2017). Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana mengintegrasikan konservasi dan kesejahteraan manusia dengan pendekatan berbasis aset untuk konservasi lingkungan dan kesejahteraan manusia yang didasarkan pada kerangka kerja biokultural untuk pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat disekitar wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka yang bersumber dari Field Museum of Natural History di Chicago. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan berbasis aset untuk perencanaan, konservasi, dan pembangunan dapat mendukung hasil konservasi yang menciptakan kesejahteraan. Misalnya dalam penggunaan dana yang ditujukan untuk mengurangi deforestasi harus juga digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal jika program yang dijalankan ingin berhasil. Tidak hanya menyalurkan dana kepada masyarakat lokal, pelaksana proyek harus memastikan bahwa aset lokal telah mendukung konservasi dan tidak terkikis oleh dana dan insentif moneter. Di dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa memvalidasi aset sosial dan ekologi melalui pendekatan

berbasis aset memberikan strategi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi, pendekatan ini diperlukan untuk dapat menentukan bagaimana memberdayakan masyarakat lokal, bagaimana mereka dapat ditingkatkan, dan secara efektif dikaitkan dengan konservasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Purwowibowo, Budhy Santoso dkk, dengan judul penelitian *Coastal Community Empowerment Strategy and The Role of Local Informal Leaders* yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dan peran pemimpin informal lokal dalam konservasi hutan bakau (Purwowibowo et al., 2019:38-50). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua tempat penelitian yaitu Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam konservasi hutan bakau dengan peran pemimpin informal lokal telah berhasil diwujudkan, pemberdayaan tersebut membuahkan hasil yang positif. Hutan mangrove memiliki banyak peluang bagi orang-orang diberbagai peluang bagi orang-orang di berbagai bidang pekerjaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kawasan laut sendiri sangat dipengaruhi oleh kelestarian hutan mangrove, keberhasilan ini dikarenakan adanya aset masyarakat yaitu masyarakat yang sadar akan lingkungan pesisir dikarenakan adanya pemimpin informal lokal. Pemimpin informal lokal mampu memanfaatkan aset masyarakat secara aktif yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dapat berhasil, sehingga berdampak pada keberlanjutan hutan mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya di sektor sosial dan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin informal lokal mempunyai peran strategis, unik, terhormat, mampu menjadi panutan dan penggerak kegiatan masyarakat sehingga masyarakat pesisir dapat bersama-sama melakukan kegiatan konservasi hutan mangrove.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Rahmat Izudin dalam penelitiannya yang berjudul *Impact Evaluation of Community Empowerment Programs with the Farmer Managed Extension Model* membahas mengenai pemetaan distribusi bantuan kepada masyarakat dan mendeskripsikan hasil evaluasi program bantuan teknologi pertanian untuk pemberdayaan masyarakat dengan indikator pemahaman program, responsivitas, efektivitas, efisiensi dan dampak program (Rahmat & Izudin, 2018:225-235). Penelitian ini memakai metode kualitatif -kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner kepada 98 responden di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berhasil disalurkan kepada masyarakat dan terbukti bahwa keefektifan, daya tanggap, efisiensi, dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kinerja dari pendamping yang menyebabkan adanya kepentingan yang bertentangan, sehingga pemerintah perlu mendesain ulang pola penyaluran bantuan yang mengutamakan asas kemanfaatan bukan pada saran dari kelompok tertentu. Konsep pemberdayaan menjadi kunci untuk melibatkan masyarakat dalam tahap persiapan dari semua program.

Berdasarkan jurnal yang telah diolah oleh penulis, terdapat persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu memiliki

tema yang sama terkait konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu salah satunya pada lokus penelitian. Penelitian sebelumnya, tidak membahas mengenai bagaimana usaha konservasi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di Danau Rawa Pening tepatnya pada Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Perbedaan lainnya yaitu terkait dengan teori yang digunakan, penelitian-penelitian sebelumnya belum menggunakan teori manajemen didalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka melakukan konservasi.

1.5.2. Administrasi Publik

A Dunsire mendefinisikan administrasi yang dikutip (Keban, 2014:2) sebagai arahan, pemerintahan, tindakan mengimplementasikan, tindakan pengarah, menciptakan dogma implementasi dalam kebijakan publik, aktivitas analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, dan pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan sebagai pekerjaan yang dilakukan secara individual maupun kelompok untuk memproduksi barang dan jasa publik serta sebagai medan bidang kerja akademik dan teoritik. Trecker, Donovan, dan Jackson (Keban, 2014:2), mengartikan administrasi sebagai sebuah prosedur yang dinamis dan berkesinambungan, dimana prosedur tersebut digerakkan untuk mencapai goal atau tujuan dengan jalan menggunakan sumber daya yang ada baik orang maupun materiil melalui koordinasi dan kerjasama.

Pekerjaan dalam administrasi meliputi kegiatan mendefinisikan dan mengidentifikasi kebutuhan, serta mendefinisikan kembali dan menginterpretasikan berdasarkan tujuan organisasi yang merupakan landasan atau tuntunan program

dan pelayanan, melindungi sumberdaya anggaran, sarana, karyawan atau pegawai, mengembangkan produk dan pelayanan, menerapkan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, mengembangkan struktur dan strategi dalam organisasi, melakukan pengembangan prinsip-prinsip operasional, melakukan evaluasi terhadap program dan kepegawaian secara kontinu, menyusun perencanaan dan melaksanakan penelitian, serta menerapkan kepemimpinan dalam prosedur perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi (Keban, 2014:2)

Chandler dan Plano (Keban, 2014:3), mendefinisikan administrasi publik merupakan sebuah cara atau metode mengkoordinasikan sumberdaya serta personil publik untuk merumuskan, menerapkan, dan melakukan pengelolaan terhadap ketetapan dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai sebuah ilmu dan seni (*science and art*) yang bertujuan untuk mengatur *public affairs* dalam pelaksanaan berbagai tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik memiliki tujuan untuk menyelesaikan dan memberi solusi bagi permasalahan publik dengan memperbaiki atau menyempurnakan terutama pada bidang organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

Banyak variasi pengertian dalam administrasi publik, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh McCurdy 1986 (Keban, 2014:3), dimana administrasi publik sebagai suatu proses politik yang berarti suatu metode memerintah suatu negara dalam melaksanakan berbagai peran negara, administrasi publik tidak semata-mata berupa permasalahan manajerial melainkan meliputi permasalahan politik. Nicholas Henry mengartikan administrasi publik sebagai sebuah kombinasi yang kompleks diantara teori dan praktek, hal tersebut bertujuan untuk memberikan

pemahaman mengenai fungsi pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat yang diperintah serta mendorong supaya kebijakan publik lebih reseptif terhadap kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sosial. Di dalam administrasi publik terdapat usaha dalam melembagakan penerapan dalam manajemen agar berjalan secara efektif, efisien, dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik bagi masyarakat.

Administrasi publik menurut Yogi (Kamaruddin, 2016:41-42), mengacu pada kata publik yang diartikan sama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diartikan secara luas yaitu kalangan umum dan keseluruhan rakyat. Seperti pada contoh kata “republik” yang memiliki arti kembali ke publik dimana semua urusan dikembalikan kepada publik dan publik memegang kekuasaan tertinggi. Kata publik sangat cocok disandingkan dengan administrasi yang merujuk pada arti pengelolaan bersama kepentingan publik. Michael M. Harmon dan Richard T. Mayer (Kamaruddin, 2016:43), mengartikan administrasi publik sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Orang-orang tersebut meliputi organisasi atau instansi publik, pegawai negeri, komisi dan korporasi publik serta gugus resmi yang melaksanakan mandat untuk kepentingan publik. Secara sederhana, Michael M. Harmon menyebutkan bahwa administrasi publik membahas tiga keputusan yaitu, memengaruhi kehidupan rakyat, mengatasnamakan publik, dan menggunakan sumber daya publik.

Ruang lingkup administrasi publik merupakan sesuatu yang sangat rumit serta bergantung pada perkembangan dari kebutuhan dan dinamika permasalahan yang dihadapi penduduk. Chandler dan Plano (Keban, 2014:8), menyebutkan

bahwa semakin kompleks permasalahan dalam kehidupan manusia maka semakin banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nicholas Henry (Keban, 2014:8), menyebutkan beberapa ruang lingkup dari administrasi publik dikaji dari unsur-unsurnya, yaitu :

1. Organisasi publik, yaitu berkaitan dengan versi atau corak organisasi dan sikap atau cara dari birokrasi.
2. Manajemen publik, berkaitan dengan prosedur dan ilmu manajemen, penilaian suatu program dan produktivitas, perhitungan dan keuangan publik, serta pengelolaan sumberdaya manusia.
3. Implementasi, berkaitan dengan ancangan pada kebijakan publik dan bagaimana penerapannya atau realisasinya, privatisasi, serta tata kelola pemerintahan dan moral birokrasi.

Di dalam administrasi publik dengan memperhatikan unsur yang dipandang penting, Keban menyebutkan bahwa setidaknya ada enam dimensi strategis dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian proses kerja yang terdiri dari merumuskan, menerapkan, dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan resmi dan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi publik serta seluruh pegawai negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yaitu masyarakat secara umum, termasuk didalamnya terdapat koordinasi antar badan

atau perorangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tersebut. Salah satu tugas pemerintahan tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain sesuai dengan ruang lingkup administrasi publik yaitu kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Suatu ilmu terus mengalami perkembangan yang dapat diamati pada perubahan paradigmanya. Kuhn mengartikan paradigma sebagai sebuah cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu (Keban, 2014:31). Apabila suatu cara pandang mengalami krisis dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan, maka orang tersebut akan mencari sebuah cara pandang baru yang dinilai sesuai dengan kata lain yaitu munculnya paradigma baru. Di dalam administrasi publik, terdapat tiga paradigma besar, diantaranya :

1) Paradigma Old Public Administration (OPA)

Paradigma ini diprakarsai oleh Woodrow Wilson, dimana harus terjadi pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif. Para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator mengimplementasikan kebijakan tersebut. Woodrow Wilson memberikan pemikiran bahwa birokrasi harus seirama dengan prinsip bisnis. Hal tersebut dimaksudkan bahwa seorang administrator harus mengedepankan nilai efisiensi dan ekonomis, sehingga mereka harus dipilih sesuai dengan kinerja dan kompetensi, bukan karena keanggotaan dalam suatu organisasi politik.

Pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Taylor dimana pegawai harus dipilih, dilatih, dan dikembangkan secara ilmiah untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di dalam perkembangannya, paradigma OPA ini menghadapi beberapa masalah seperti seiring berkembangnya organisasi berubah menjadi kaku, bertele-tele, dan penuh *red tape*. Masalah lainnya yaitu di dalam pemikiran Taylor mengatakan, hanya ada satu cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan, namun seiring perkembangan zaman ditemukan banyak cara lain. Wilson juga cenderung melihat administrasi publik sebagai kegiatan yang tidak bersifat politis, namun didalam kenyataannya bersifat politis. Beberapa hal yang dapat dipelajari dalam paradigma ini yaitu, di dalam membangun birokrasi dibutuhkan sikap profesional, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan impersonal, penetapan aturan dan standar yang tegas, sikap netral, dan efisiensi, serta efektivitas.

2) Paradigma New Public Management (NPM)

Paradigma ini pertama kali muncul dilatar belakang krisis fiskal yang terjadi pada tahun 1970an dan 1980an, berbagai aduan masyarakat yang menyebutkan bahwa sektor publik itu besar, boros, inefisien, menurunnya kinerja pelayanan publik, minimnya perhatian pada pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah (Hope dalam Keban, 2014 : 245). Pada saat kemunculannya, paradigma NPM meliputi lima doktrin diantaranya : (1) penerapan deregulasi pada *line management*, (2) mengkonversi unit-unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri, (3) penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja

terutama melalui kontrak, (4) penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan kontrak keluar, (5) memperhatikan mekanisme pasar.

Di dalam perkembangannya, NPM terus mendapatkan tambahan doktrin yang lebih banyak dan variatif, namun hal tersebut menjadikan NPM sebagai upaya para ahli dalam melakukan modernisasi pada sektor publik. Keberhasilan penerapan NPM di suatu negara tergantung dengan konteks dan karakteristik negara yang ditangani, kemampuan institusi, dan konteks dari institusi tersebut seperti iklim dan ideologi yang dianut, sikap terhadap otoritas, hubungan sosial dan kelompok.

NPM mendapatkan kritikan di dalam perkembangannya dikarenakan elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memenuhi kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Di sisi lain, NPM didasari pada *public choice*, dimana hal tersebut didominasi oleh kepentingan pribadi, selain itu NPM tidak ditujukan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kemunculan NPM menjadi ancaman bagi nilai inti sektor publik yaitu *citizen selfgovernance* dan fungsi administrator sebagai *servant of public interest*, sehingga apabila tidak dilaksanakan dengan hati-hati dapat terjadi kenaikan korupsi dan memunculkan orang miskin baru.

Beberapa hal penting yang bisa dipelajari dari NPM yaitu bahwa didalam membangun birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, responsif pada kebutuhan pelanggan, bersifat mengrahkan daripada melaksanakannya sendiri, melakukan

deregulasi, memberdayakan semua pihak untuk kreatif, dan mengutamakan budaya organisasi yang fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil daripada budaya taat asas, orientasi pada proses dan input.

3) Paradigma New Public Service (NPS)

Pada paradigma ini, rakyat dipandang sebagai masyarakat bukan pelanggan, sehingga dapat saling berbagi kekuasaan dan kendali, serta dapat mempercayai keefektifan kolaborasi. Partisipasi masyarakat di paradigma ini harus dipandang sebuah “investasi”, sehingga harus dibangun kepercayaan dan sikap responsif pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya untuk mendapat efisiensi yang lebih tinggi seperti pada paradigma NPM. Pemerintah diharuskan memberikan jaminan pada hak masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan mereka.

Di dalam NPS, terdapat tujuh prinsip, diantaranya : (1) peran utama dari pelayan publik yaitu membantu masyarakat memenuhi kepentingannya, bukan sekedar mengontrol atau mengendalikan masyarakat, (2) administrator perlu menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama sebagai kepentingan publik, (3) kebijakan dan program yang ditujukan untuk publik harus dicapai secara efektif dan responsif melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif, (4) kepentingan publik merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama, (5) pelayan publik perlu memperhatikan pada aspek hukum, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional dan kepentingan warga masyarakat, (6) organisasi publik akan sukses bila beroperasi dengan kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang,

(7) kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik dan masyarakat daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seolah uang adalah milik mereka.

Hal-hal penting dalam paradigma NPS diantaranya, bahwa birokrasi perlu dibangun dengan memperhatikan pada pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan umum, melibatkan masyarakat, berpikir strategis dan demokratis, memperhatikan nilai dan norma yang ada, dan menghargai masyarakat.

Di dalam penelitian ini, termasuk kedalam paradigma ketiga yaitu *New Public Service* dikarenakan penelitian ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi, dimana didalam penelitian ini akan dibahas mengenai usaha pemerintah bersama masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan untuk melestarikan Danau Rawa Pening yang termasuk ke dalam 15 Danau Prioritas Nasional. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang diangkat dalam paradigma NPS yaitu mengikutsertakan warga masyarakat di dalam kepentingan publik.

1.5.4. Manajemen Publik

Manajemen menurut Usman, berasal dari bahasa latin yaitu "*manus*" yang berarti tangan dan "*agere*" yang berarti melakukan (Rohman, 2017:7) . Kedua kata tersebut kemudian disambungkan dan menjadi "*managere*" yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata "*management*" . Di dalam bahasa Indonesia kata "*management*" berarti pengelolaan.

Ismaniar dan Hetty (Rohman, 2017:7), memberikan beberapa definisi manajemen, diantaranya : (1) manajemen merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia serta menerapkan pembagian tugas dengan profesional; (2) manajemen merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses memaksimalkan sumber daya yang ada, pengaturan anggaran, dan material; (3) manajemen merupakan bentuk pengkoordinasian dan penyatuan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus; (4) manajemen merupakan bentuk kerja mengkoordinasikan berbagai sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pygors dan Myeers (Keban, 2014:91), mengartikan manajemen sebagai “sebuah hasil atau proses yang didapatkan melalui kerja orang lain”. Pernyataan tersebut memiliki beberapa elemen penting yaitu, pertama manajemen merupakan proses keterlibatan yang didasarkan adanya kesatuan ; kedua, proses tersebut dilaksanakan oleh individu-individu yang dipimpin oleh manajer; ketiga, kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Definisi lain juga disampaikan oleh Shafritz dan Russel (Keban, 2014:92), yang mengartikan bahwa manajemen berhubungan dengan individu yang menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap suatu organisasi, dan proses dalam organisasi tersebut meliputi penggunaan secara bijak sumber daya untuk menggapai tujuan organisasi. Luther Gulick dalam Widowati (Munfaati et al., n.d., 2019:7), mengartikan manajemen sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang secara terstruktur berusaha

untuk mendalami dan memahami mengapa dan bagaimana manusia melakukan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang bermanfaat bagi mereka.

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (Sarinah, 2017:1), menjelaskan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajer dalam rangka mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pada pekerjaan orang lain, sehingga mampu menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien. Efisien diartikan mampu menghasilkan output sebanyak mungkin dari input yang seminimal mungkin, sedangkan efektif yaitu mengerjakan hal yang tepat, benar dan terorganisir sesuai dengan tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah direncanakan. Pengertian manajemen juga disampaikan oleh Ricky W. Griffin (Sarinah, 2017:1), dimana dijelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Di dalam perkembangannya, terdapat tiga pandangan terkait manajemen yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. Manajemen normatif mendeskripsikan tindakan yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer dalam sebuah proses manajemen, sedangkan manajemen deskriptif mendeskripsikan apa yang senyatanya dilakukan oleh seorang manajer ketika melaksanakan pekerjaannya (Chung & Megginso dalam Keban, 2014:94). Kedua pandangan tersebut tidak jelas dalam menggambarkan lokus yang dimaksud sehingga lebih mengarah kepada manajemen secara umum. Di dalam manajemen publik mendeskripsikan tindakan terbaik yang dipilih dan apa yang senyatanya harus dilaksanakan oleh seorang manajer publik dalam instansi pemerintahan.

Donovan dan Jackson (Keban, 2014:107), menyebutkan tugas-tugas dalam manajemen, diantaranya :

1. Perencanaan, mencakup kegiatan pembuatan kebijakan, tujuan, dan standar; mengembangkan aturan, prosedur, dan rencana, melakukan proyeksi, mengkaji lingkungan, dan melakukan penilaian terhadap proses perencanaan apakah efektif atau tidak.
2. Pengorganisasian, meliputi kegiatan pembagian tugas kepada anggota organisasi, menciptakan struktur secara fungsional dan sosial, mendistribusikan kekuasaan dan wewenang, membuat garis komunikasi dan otoritas, melakukan sinkronisasi kepada bawahan, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode pengorganisasian.
3. *Staffing*, meliputi pekerjaan mengenai menetapkan jenis individu yang akan bekerja, perekrutan pegawai, melakukan seleksi pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, melakukan pengembangan kemampuan staf melalui training, melaksanakan evaluasi terhadap kinerja, dan melakukan penilaian pada kegiatan *staffing*.
4. *Leading*, mencakup kegiatan menggerakkan pegawai untuk melaksanakan tugasnya, menjaga semangat kerja, memotivasi karyawan, membangun iklim kerja dan organisasi yang konstruktif serta harmonis bagi karyawan, dan melaksanakan penilaian terhadap kegiatan *leading* dan efektivitas kepemimpinan manajer.

5. *Controlling*, meliputi kegiatan menetapkan standar dalam organisasi, menciptakan perubahan, melakukan pengembangan struktur dan akuntabilitas, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah rangkaian proses pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manager yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengontrolan seluruh sumber-sumber yang terdapat di dalam organisasi untuk dimanfaatkan guna pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sangat diperlukan agar seorang manager mampu mengelola organisasinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen publik merupakan bagian ilmu dari administrasi publik yang secara eksklusif menjelaskan terkait rancangan program dan penataan kembali organisasi, distribusi dari sumber daya melalui rencana penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta melakukan penilaian suatu kegiatan serta pemeriksaan (Ott, Hyde & Shafritz dalam Wijaya, A. F, & Danar, 2014:1). Kehadiran manajemen publik sebagai suatu ilmu berawal dari ide yang sederhana yaitu pada dasarnya organisasi sektor publik perlu untuk dikelola oleh seorang manajer publik yang mengatur berbagai hal dalam organisasi publik. Manajemen publik memiliki fokus utama yaitu pada internal organisasi berkaitan dengan bagaimana mengelola organisasi sektor publik sehingga mampu beroperasi secara maksimal untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, manajemen publik juga tidak membenamkan eksternal organisasi publik yang dipengaruhi oleh kebijakan publik

dan kepentingan politik, hal tersebut merupakan ciri khas dari organisasi publik yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya.

Lynn (Wijaya, A. F, & Danar, 2014:2), memberikan tiga gambaran dalam manajemen publik yaitu sebagai seni (*art*), ilmu, (*science*), dan sebagai profesi (*profession*). Manajemen publik sebagai sebuah seni berarti kegiatan kreatif yang dilakukan oleh para praktisi tidak dapat dihitung sehingga manajemen merupakan sebuah aktivitas yang fleksibel dan tergantung pada situasi dan kondisi dimana beroperasi. Manajemen publik sebagai ilmu berarti bahwa memerlukan sebuah kajian yang terstruktur dalam menggunakan klarifikasi dan eksplanasi. Manajemen publik sebagai sebuah profesi menunjuk pada individu yang membaktikan dirinya pada ilmu manajemen.

David Gerson dan E. Samuel memberikan perbedaan antara manajemen dalam organisasi publik dan dalam organisasi swasta ke dalam model PAFHRIER. PAFHRIER adalah kependekan dari *Policy Analysis, Financial Management, Human Resource Management, Information Management, dan External Relation* (Keban, 2014:102). *Policy Analysis* yaitu pengembangan dari fungsi *planning* dan *reporting*. *Financial Management* merupakan bentuk paralel dari fungsi *staffing, directing, dan coordinating*. *Financial management* yaitu pengembangan dari *budgeting* dan *information management* merupakan bentuk pengembangan dari *reporting, directing, dan coordinating*.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan bagian dalam ilmu administrasi publik yang mengkaji sebuah proses kerjasama antar kelompok maupun individu untuk mencapai tujuan bersama yaitu

memenuhi kepentingan publik atau masyarakat umum. Berbeda dengan manajemen secara umum, manajemen publik lebih berfokus pada bagaimana cara manajer publik dalam mengelola internal dan eksternal dari organisasi publik yang berfokus pada penyediaan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Pelayanan kepada masyarakat tersebut termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Di dalam rangka melaksanakan pelayanan tersebut, instansi publik memberikan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5.5. Manajemen Lingkungan

Di dalam manajemen publik, memiliki fokus pada pengelolaan organisasi publik baik dari segi internal maupun eksternal yang bertujuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi publik merupakan badan yang identik dengan pemerintahan negara yang merupakan sebuah lembaga yang berorientasi pada kepentingan publik sehingga tidak mementingkan pada target atau laba (Prayoga & Yuhertiana, 2021:69). Organisasi sektor publik memiliki cakupan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, bahan bakar, lingkungan, dan lain-lain. Salah satu kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan publik adalah tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk keberlanjutan kehidupan dan ketersediaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Dimasa kini lingkungan hidup semakin menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dimana kerusakan yang terjadi menyebabkan ketersediaan sumberdaya menjadi berkurang bahkan langka. Indonesia termasuk ke dalam negara yang rentan terhadap perubahan iklim dimana menyebabkan produksi pangan turun, ketersediaan air yang tidak stabil, dan munculnya berbagai hama. Kerusakan lingkungan juga menyebabkan ketersediaan sumber daya dari segi kualitas maupun kuantitas menjadi turun. Berbagai masalah yang muncul terkait lingkungan hidup membutuhkan adanya pengelolaan lingkungan yang baik seperti yang tertulis pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu turunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga diperlukan usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara konsisten dan sungguh-sungguh yang melibatkan semua pihak.

Manajemen lingkungan terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan lingkungan. Manajemen menurut Atmosudirdjo merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang didasarkan pada perencanaan untuk mencapai suatu tujuan kerja tertentu (Rohman, 2017:10). George Terry mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilaksanakan dalam menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di organisasi (Rohman, 2017:9)

Lingkungan secara harfiah memiliki arti “ruang lingkup”, “sekitar”, “alam sekitar”, atau “masyarakat sekitar”. Lingkungan juga memiliki arti sesuatu yang

memberikan pengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup secara kolektif dan semua makhluk hidup dengan kekuatan-kekuatan alaminya. Di dalam lingkungan, dikenal adanya lingkungan hidup yang didefinisikan sebagai semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat dimana manusia dan makhluk hidup lainnya saling mempengaruhi (Alaby dalam Sembel, 2015:6). Lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memberikan pengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan merupakan tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup salah satunya manusia, dimana manusia dan lingkungan memiliki keterikatan, sehingga terdapat interaksi antara komponen lingkungan fisik maupun biotik (Indarjani et al., 2020:53). Komponen fisik terdiri dari hewan dan tumbuhan, sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, air, bebatuan, dan lain-lain. Dapat dilihat dengan jelas bahwa manusia termasuk ke dalam komponen fisik yang aktif dan memiliki peran penting bagi lingkungan. Manusia memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengubah lingkungan dan ekosistem sesuai dengan kehendaknya serta kegiatan yang dilakukan manusia dapat memunculkan banyak gejala.

Muniarty dan Nurhayati menyebutkan bahwa tingkah laku, corak kepentingan, kepentingan ideologi, pandangan nilai dan lain-lain dapat menimbulkan gejala untuk lingkungan yang berkaitan dengan baik buruknya kualitas lingkungan (Indarjani et al., 2020:53). Kualitas lingkungan sendiri sangat

mempengaruhi kehidupan manusia yaitu apabila lingkungan buruk seperti pencemaran, polusi, banjir, dan sebagainya dapat berakibat buruk pula bagi kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, lingkungan dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup baik komponen fisik atau biotik maupun komponen abiotik, dimana terdapat hubungan saling keterkaitan atau timbal balik.

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terkait dengan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin ketersediaan sumber daya melalui serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplentasian, dan pengawasan, agar dapat dimanfaatkan untuk masa kini dan generasi yang akan datang. Di dalam manajemen lingkungan terdapat proses pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam rangka memelihara dan memperbaiki lingkungan agar terpenuhi kebutuhan dasar dengan baik.

Sistem Manajemen Lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen yang berguna untuk menjaga dan merealisasikan kebijakan lingkungan tepat sesuai sasaran. Sistem Manajemen Lingkungan juga diartikan sebagai pengoptimalisasian struktur organisasi, akuntabilitas, tata cara dan sumber daya guna menentukan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan. Adanya sistem manajemen lingkungan dapat mengurangi resiko lingkungan yang mungkin timbul, pengelolaan yang sesuai dengan standar, serta pemanfaatan sumberdaya yang tepat untuk kesejahteraan umum tanpa eksploitasi yang berlebihan (Putri & Indriana, 2017:38) Implementasi sistem manajemen lingkungan dapat berjalan secara efektif

apabila terdapat konsensus bersama antara lembaga publik, swasta dan masyarakat dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan hingga evaluasi yang berguna sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, manajemen lingkungan yang baik dapat terwujud apabila didalam pelaksanaannya terdapat peran aktif dari lembaga publik, swasta, dan masyarakat dalam berbagai proses. Hal serupa juga dikatakan oleh Ife dan Tesoriero, dimana dalam pengelolaan lingkungan melalui konservasi perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait pengembangan lingkungan (Ife, J & Tesoriero, 2014:472). Di dalam hal ini maka masyarakat perlu untuk diberdayakan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan lingkungan, sehingga lingkungan tetap terjaga untuk kesejahteraan masyarakat dimasa kini dan yang akan datang.

1.5.6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti “kekuatan” yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*empowerment*”. Pemberdayaan berarti memberikan daya atau kekuatan kepada suatu kelompok yang lemah untuk dapat mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tindakan sosial dimana masyarakat atau sebuah kelompok mengorganisasikan diri untuk merencanakan dan melakukan tindakan kolektif yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial atau kebutuhan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki (Gunawan dalam Ir. Hendra Hamid, 2018:10). Di dalam hal tersebut, pemberdayaan termasuk

dalam suatu proses di dalam manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Secara konseptual, pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk mewujudkan kehidupan manusia yang adil dan beradab dalam berbagai bidang kehidupan seperti keluarga, masyarakat, negara, regional, politik, sosial, dan ekonomi. Pemberdayaan juga meliputi upaya dalam mengembangkan, melatih kemandirian, menswadayakan, dan memperkuat lapisan masyarakat bawah agar mampu bertahan terhadap penekanan golongan yang kuat pada segala bidang kehidupan dan memberikan masyarakat kemampuan agar mampu bertanggung jawab pada setiap pengambilan keputusan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan yang meliputi berbagai upaya perbaikan, seperti; upaya perbaikan pada pendidikan, perbaikan pada aksesibilitas, perbaikan tentang tindakan dan kelembagaan, perbaikan pada usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan pada lingkungan, serta perbaikan pada kehidupan dan perbaikan masyarakat. Beberapa perbaikan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, dimana apabila satu perbaikan terpenuhi maka perbaikan berikutnya juga dapat terpenuhi (Mardikanto, T. & Soebianto, 2012:111).

Di dalam tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut, salah satunya adalah perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan diartikan sebagai usaha didalam memperbaiki lingkungan masyarakat baik segi fisik maupun sosial yang diakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut timbul

karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan sehingga masyarakat terus menerus mengambil sumber daya tetapi tidak dapat merawat lingkungannya (Ir. Hendra Hamid, 2018:13). Di dalam hal ini, pemberdayaan menjadi salah satu dari proses pengelolaan atau manajemen lingkungan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan sehingga dapat digunakan untuk masa kini dan generasi masa mendatang. Hendra Hamid menyebutkan beberapa elemen fungsi dalam manajemen pemberdayaan masyarakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, permotivasi, dan pengendalian atau pengawasan.

Di dalam beberapa pengertian dinyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pemberian daya baik pemberian “kemampuan atau keberanian” ataupun daya yang diartikan sebagai kekuasaan. Di dalam proses tersebut meliputi beberapa lingkup kegiatan yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan (Mardikanto, T. & Soebianto, 2012:113)

1. Bina Manusia

Bina manusia diartikan sebagai upaya yang utama dan pertama dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, hal tersebut didasarkan pada tujuan pembangunan yaitu untuk memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, manusia merupakan sumber daya dan sebagai pelaku dalam pengelolaan berbagai hal sehingga merupakan faktor penting. Bina manusia meliputi kegiatan yang termasuk upaya penguatan atau pengembangan kapasitas, yaitu :

- (1) Pengembangan kapasitas individu yang berkaitan dengan meningkatkan kapasitas diri, peningkatan kualitas di dunia kerja, dan pembentukan sikap

profesional; (2) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang terdiri dari kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi, struktur organisasi yang jelas, kompetensi, dan strategi organisasi, proses organisasi atau manajemen organisasi, pengembangan jumlah dan mutu sumber daya, hubungan antar individu, interaksi dengan entitas organisasi dan pemangku kepentingan; (3) pengembangan kapasitas jaringan yang terdiri dari pengembangan interaksi dengan entitas (organisasi) dalam sistem yang sama dan pengembangan interaksi bersama entitas/organisasi diluar sistem.

2. Bina Usaha

Bina usaha merupakan sebuah usaha yang penting dikarenakan pemberdayaan tanpa menghasilkan suatu usaha untuk perbaikan ekonomi akan menimbulkan kekecewaan, sedangkan pemberdayaan yang mampu menghasilkan dampak dan manfaat untuk peningkatan perekonomian akan mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Bina usaha meliputi beberapa hal diantaranya ; pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, membentuk badan usaha, merencanakan investasi dan menetapkan sumber-sumber pembiayaan, mengelola SDM dan pengembangan karir, manajemen produksi dan operasi, manajemen logistik dan finansial, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan sejalan dengan mazhab pembangunan berkelanjutan yang mana lingkungan merupakan hal penting, sehingga pelestarian lingkungan perlu dilakukan. Lingkungan tidak hanya mengenai lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial, sehingga dalam bina lingkungan meliputi upaya menumbuhkan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab sosial merupakan segala kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat, sedangkan tanggung jawab lingkungan yaitu kewajiban berkaitan dengan melindungi, melestarikan, dan memulihkan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses didalam memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat melaksanakan tindakan sosial dan mengorganisasikan diri dalam menyusun perencanaan untuk memecahkan suatu masalah. Pemberdayaan sebagai sebuah proses dalam manajemen, memiliki tujuan yaitu perbaikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, aksesibilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan, dan masyarakat. Di dalam sebuah proses pemberdayaan, partisipasi dan dukungan dari masyarakat merupakan hal penting dimana masyarakat merupakan objek dalam pemberdayaan yang diberikan kekuatan untuk menggali potensi dan memperbaiki kualitas hidup.

Di dalam penelitian ini, pemberdayaan merupakan salah satu proses dalam manajemen yang terdiri dari beberapa kegiatan dimulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengendalian atau pengawasan (Ir. Hendra Hamid, 2018:5). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hendra Hamid yang menyebutkan elemen fungsi di manajemen pemberdayaan masyarakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengawasan atau pengendalian . Di dalam proses tersebut, terdapat tujuan yaitu memberikan kemampuan yang lebih dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya serta potensi yang tersedia diwilayahnya. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen lingkungan untuk melestarikan lingkungan hidup agar bisa dimanfaatkan untuk masa kini dan generasi masa mendatang. Salah satu kegiatan didalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yaitu adanya kegiatan konservasi yang merupakan usaha untuk melestarikan sumber daya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Konservasi membutuhkan adanya peran serta dari masyarakat melalui beberapa kegiatan yang berhasil dan berdaya guna. Peran serta masyarakat tersebut merupakan tugas pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran dalam konservasi sumber daya salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.5.7. Konservasi

Manajemen lingkungan atau pengelolaan pada lingkungan termasuk kedalam berbagai usaha meliputi mencegah, menanggulangi kerusakan, pencemaran, dan memulihkan kualitas lingkungan (Geumala et al., 2018:2). Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pengelolaan dan pengendalian lingkungan meliputi usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan

mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu usaha tersebut melalui konservasi yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan lingkungan dan sumber daya secara bijaksana serta melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Konservasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan usaha yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Di dalam lingkungan, konservasi didefinisikan sebagai usaha untuk bertindak efisiensi pada pemakaian energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berdampak pada adanya pengurangan konsumsi energi di lain pihak. Konservasi juga diartikan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan secara hati-hati terhadap sumber daya alam yang ada di lingkungan, sehingga tetap terjaga kuantitasnya dalam jangka panjang serta untuk menjaga keanekaragaman hayati dan spesies yang ada pada suatu lingkungan (Christanto, 2014:1.3).

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya : (1) melindungi sistem penyangga kehidupan, (2) mengawetkan keanekaragaman satwa dan jenis tumbuhan juga didalamnya ekosistem mereka, dan (3) memanfaatkan secara bijak sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Di dalam Bab IX Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 37 tentang peran serta masyarakat disebutkan bahwa partisipasi masyarakat di dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dibimbing dan digerakkan oleh Pemerintah dengan mengadakan berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan memiliki peran, pemerintah memberikan pendidikan dan penyuluhan, sehingga dapat meningkat kesadaran masyarakat di konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Di dalam sebuah penelitian, konsep merupakan hal yang penting dan harus dioperasionalkan dengan tujuan agar peneliti sesuai dengan alur dan teori yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti menentukan konsep manajemen pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat sebagai Usaha Konservasi

1. Perencanaan, merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam menetapkan tujuan serta langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Di dalam hal ini, melihat dan menganalisa pada proses penetapan tujuan, visi dan misi, program-program, prosedur pelaksanaan, sistem anggaran, standar yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi, serta peran masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan.
2. Pengorganisasian, yaitu suatu proses di dalam melakukan pembagian kerja untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan yaitu pemberdayaan sebagai usaha

konservasi Danau Rawa Pening, sehingga dapat diselesaikan oleh setiap anggota kelompok. Di dalam pengorganisasian, juga terdapat pembentukan hubungan kerja yang baik dan memberikan lingkungan serta fasilitas yang kondusif. Di dalam hal ini, menganalisa pada jumlah sumberdaya yang dibutuhkan, proses perekrutan dan pembagian sumberdaya, pendelegasian tugas dan wewenang, proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas, serta fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi.

3. Pengarahan, yaitu rangkaian kegiatan didalam memberikan instruksi atau petunjuk dari pimpinan kepada anggota terkait dengan pelaksanaan tugas. Didalam pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi, melihat dan menganalisa pada proses memberikan pengarahan, prosedur dalam memberikan instruksi, kesesuaian instruksi dengan tujuan yang hendak dicapai, serta peran masyarakat dalam rangkaian pengarahan yang diberikan oleh instansi atau dinas terkait.
4. Permotivasian, yaitu proses dan rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan dorongan atau semangat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan tugas yang diberikan. Di dalam hal ini, melihat dan menganalisa pada pihak yang bertugas memberikan dukungan dan motivasi, upaya-upaya yang dilakukan untuk memotivasi dan mendukung masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagai usaha konservasi, serta dampak yang dihasilkan dari proses permotivasian.

5. Pengendalian atau Pengawasan, merupakan rangkaian kegiatan dalam mengupayakan suatu pekerjaan atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, sehingga apabila ada sesuatu yang menyimpang dapat segera diatasi. Di dalam hal ini melihat dan menganalisa kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh, mendeteksi apabila ada masalah atau hambatan yang muncul, menemukan solusi untuk mengatasi hambatan atau meningkatkan hasil kerja pada program-program pemberdayaan berikutnya, serta dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan bagi usaha konservasi Danau Rawa Pening.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Usaha Konservasi Danau Rawa Pening di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

Di dalam sebuah pemberdayaan masyarakat sebagai usaha konservasi Danau Rawa Pening, dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian, merupakan metode yang digunakan peneliti dalam mengkaji suatu fenomena atau permasalahan. Penggunaan pendekatan yaitu salah satu metode atau cara yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2018:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kalimat yang disampaikan orang-orang dan perilaku yang diamati. Di dalam metode kualitatif, individu dan organisasi yang diamati tidak boleh diisolasi ke dalam suatu variabel atau hipotesis, melainkan dipandang sebagai suatu keutuhan. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2018:5), mengartikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memakai latar ilmiah untuk tujuan menggambarkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode. Di dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dipakai meliputi wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen sekunder.

1.7.2. Situs Penelitian

Penentuan situs atau lokasi penelitian didasarkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau kejadian yang akan diteliti dengan berbagai pertimbangan cukup representatif, yang didukung sumberdaya yang memadai, sarana prasarana yang mendukung, dan lokasi yang strategis dengan kemudahan informasi, komunikasi, dan koordinasi. Lokasi dalam riset ini adalah Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

1.7.3. Subyek Penelitian

Subyek ditentukan dengan pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah informan yang menguasai permasalahan yang diambil pada penelitian ini, memiliki data dan dapat memberikan jawaban secara akurat atas pertanyaan yang diajukan peneliti.

Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

2. Sub Koordinator Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.
4. Kepala Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru.
5. Masyarakat Desa Kebondowo yang Mengikuti Pemberdayaan Sebanyak 5 Orang.

1.7.4. Jenis Data

Jenis data di dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk kata verbal dan bukan angka seperti kondisi geografis lokasi penelitian, kondisi lingkungan, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana, kondisi sosial dan budaya, serta pelaksanaan program pemberdayaan yang sudah ada. Data kuantitatif yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk angka baik dalam tabel maupun grafik. Data kuantitatif digunakan untuk menunjukkan banyaknya penduduk, tingkat kemiskinan dan kesejahteraan, banyaknya petani dan nelayan, indeks kualitas air, luas wilayah tertutup eceng gondok, kedalaman sedimentasi, dan lain-lain.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif menurut Lofland & Lofland (Moleong, 2018:157), meliputi kata-kata dan tindakan dari informan yang dipilih serta ditambah dengan dokumen-dokumen terkait fenomena yang diteliti. Sumber data pada riset ini berupa keterangan secara langsung dari narasumber, buku, dokumen,

laporan, dan sebagainya. Di dalam penelitian kualitatif ini, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan melalui proses wawancara. Di dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, dan Kepala Dusun Kebondowo Kecamatan Banyubiru serta beberapa masyarakat Desa Kebondowo mengenai konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak melalui informan secara langsung, data ini berbentuk data pendukung penelitian seperti buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, catatan, laporan, dokumen, arsip, dan lain-lain.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data melalui teknik observasi dilakukan dengan mengamati setiap objek yang berkaitan dengan tema penelitian. Observasi dilakukan tidak sebatas pada responden saja melainkan pada objek-objek alam lainnya. Teknik observasi digunakan untuk mengamati objek pada penelitian yang mencakup tingkah laku manusia manusia, prosedur kerja, dan gejala-gejala alam namun tidak terlalu luas. Pengamatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dengan cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pengamatan dengan peran serta dilakukan melalui peneliti memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan menjadi anggota dalam sebuah kelompok yang diamati. Pengamatan tanpa berperan serta dilakukan dengan peneliti hanya mengamati

atau sekedar mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena (Moleong, 2018:175-176).

Pengamatan juga terbagi menjadi pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup yang didasarkan pada pengamat dan latar penelitian. Pengamatan terbuka diketahui oleh subyek penelitian dan secara sukarela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa atau fenomena yang terjadi, sedangkan pada pengamatan tertutup dilakukan tanpa sepengetahuan dari subyek penelitian. Pengamatan tertutup biasanya dilakukan pada tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, taman, halte, jalan raya, dan lain-lain (Moleong, 2018:176).

Pada penelitian ini, peneliti akan memakai jenis observasi tanpa peran serta dan observasi terbuka. Pada pengamatan tersebut, peneliti tidak ikut berperan serta dan melakukan pengamatan dengan izin atau sepengetahuan subyek penelitian di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Teknik ini digunakan dengan tujuan mendapatkan data terkait konservasi dan proses pemberdayaan yang dilaksanakan dalam desa tersebut.

2. Wawancara

Lincoln & Guba (dalam Moleong, 2018:186), mendefinisikan wawancara sebagai kegiatan mengkonstruksi mengenai orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian untuk diamati, diverifikasi, dan diperluas serta dikembangkan oleh peneliti. Lincoln & Guba menyebutkan beberapa jenis wawancara yaitu :

- 1) Wawancara oleh tim atau panel

Wawancara yang dilakukan dengan dua orang atau lebih, namun harus terdapat persetujuan atau kesepakatan, apakah pihak yang diwawancarai tidak keberatan apabila terdapat dua orang pewawancara.

2) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka

Wawancara tertutup, dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari subyek penelitian, sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, sedangkan pada wawancara tertutup, subyek penelitian mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara yang diadakan.

3) Wawancara riwayat secara lisan

Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yang membuat sejarah, atau suatu karya ilmiah yang besar, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. Tujuan dari wawancara ini, yaitu mendapatkan informasi mengenai riwayat hidup, pekerjaan, kesenangan, ketekunan, pergaulan, dan sebagainya.

4) Wawancara terstruktur dan tak terstruktur

Wawancara terstruktur, merupakan bentuk wawancara dimana peneliti menetapkan permasalahan dan pertanyaan – pertanyaan yang diajukan, dengan tujuan menjawab hipotesis kerja. Di dalam wawancara terstruktur, pertanyaan disusun dengan rapi dan menggunakan format yang disebut protokol wawancara. Kelebihan dari wawancara terstruktur yaitu menghindari dan jarang terjadi pertanyaan yang mengarahkan pada narasumber yang berdusta mengenai suatu peristiwa. Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang dipakai untuk mendapatkan informasi yang tidak baku atau informasi tunggal.

Pada penelitian ini, peneliti akan memakai jenis wawancara terbuka dan terstruktur yaitu dengan subyek penelitian mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian, kemudian peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam protokol wawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Di dalam penelitian ini, pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala Bidang Pengembangan Desa, Sumberdaya Alam, dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Semarang, Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Kepala Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, dan masyarakat Desa Kebondowo yang mengikuti pemberdayaan sebanyak 5 orang.

3. Dokumentasi

Di dalam penelitian kualitatif, dokumen memiliki fungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, menemukan lokasi, dan cara untuk memperolehnya. Barlian (Barlian, 2018:57) menyebutkan tiga bentuk dokumen yaitu :

- 1) Dokumen pribadi, berguna dalam mengetahui situasi sosial dan bagaimana seseorang melihat kenyataannya, dokumen pribadi berbentuk catatan harian, surat, dan log yaitu catatan harian mengenai orang lain.
- 2) Autobiografi yang diterbitkan orang lain, dokumen ini berguna dalam memberikan pandangan ketika digabungkan dengan sumber lainnya.
- 3) Dokumen resmi, biasanya berbentuk memo, catatan hasil sidang, korespondensi, regulasi atau tata tertib, proposal, laporan, arsip dan dokumen kebijaksanaan.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2018:280), merupakan proses di dalam membuat urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Adanya analisis data memberikan kemudahan dalam menetapkan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data. Proses analisis data perlu dilakukan setelah meninggalkan lapangan. Di dalam analisis data, peneliti perlu memusatkan perhatian dan pikiran untuk meminimalisir adanya kesalahan. Sugiyono secara umum menyebutkan, proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2016:246).

1. Reduksi Data

Mereduksi data meliputi aktivitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, berfokus pada poin penting, dan menemukan tema dan polanya. Data yang telah direduksi memiliki gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data-data berikutnya. Reduksi dapat dilakukan dengan bantuan alat elektronik dengan memberikan kode pada data.

2. Penyajian Data

Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, namun penyajian dalam bentuk naratif yang biasanya sering digunakan. Penyajian data memudahkan dalam memahami fenomena yang terjadi dan merencanakan langkah kerja berikutnya. Penyajian tidak hanya dilakukan dalam bentuk narasi, tetapi juga dalam bentuk grafik, matrik, dan *chart*.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Di dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya data-data terkait fenomena yang diteliti. Kesimpulan pada penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, dikarenakan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.

Analisis data dilapangan juga dilakukan berdasarkan model Spardley 1980 (dalam Sugiyono, 2016:253), yaitu analisis domain. Analisis domain merupakan langkah awal dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh mengenai situasi sosial yang diteliti. Data dalam analisis ini diperoleh melalui *grand tour* dan *minitour question* yang menghasilkan data berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti. Di dalam analisis ini, informasi yang didapatkan masih bersifat dipermukaan atau tidak dalam, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari sistuasi sosial yang akan diteliti. Di dalam menemukan domain, dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap hubungan semantik antar kategori yang meliputi sembilan tipe yaitu jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi untuk melakukan sesuatu, fungsi, cara mencapai tujuan, urutan, dan atribut.

1.7.8. Kualitas Data

Moleong (2018: 326-342), menyebutkan beberapa teknik yang dilakukan dalam memeriksa kualitas dan keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan yaitu peneliti harus terjun di lapangan dalam waktu yang lama yang bertujuan untuk mendeteksi dan memperhitungkan adanya distorsi pada data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat membatasi gangguan yang mungkin muncul, peneliti telah keliru, dan mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang bersifat sesaat.

2. Ketekunan dan keajegan pengamatan

Keajegan didefinisikan sebagai konsisten dalam proses analisis data dan berusaha membatasi berbagai pengaruh yang mungkin muncul. Peneliti diharuskan melakukan pengamatan secara teliti dan teliti secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk memeriksa keabsahan data. Denzin (dalam Moleong, 2018 : 330), mengartikan triangulasi sebagai sebuah teknik dalam memeriksa data yang menggunakan metode, sumber, teori, dan penyidik. Proses dalam triangulasi diantaranya; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan perkataan orang didepan umum dan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang disituasi penelitian dan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif orang dari berbagai orang seperti warga biasa, berpendidikan menengah dan tinggi, orang berkecukupan, dan pegawai pemerintahan; serta (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.